

**ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL DI KABUPATEN/KOTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2018**



**TESIS
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
DALAM EKONOMI ISLAM**

OLEH:

**FITRI RAHMAWATI
NIM. 18208010008**

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFLI., M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

**ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL DI KABUPATEN/KOTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2018**



**TESIS
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
DALAM EKONOMI ISLAM**

**OLEH:
FITRI RAHMAWATI
NIM. 18208010008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-344/Un.02/DEB/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL DI KABUPATEN/KOTA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI RAHMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 18208010008
Telah diujikan pada : Kamis, 23 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Penguji I

Penguji II

Dr. Sunaryati, SE., M.Si.
NIP. 19751111 200212 2 002

Dr. Ibnu Muhrir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 18 Mei 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dekan



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Fitri Rahmawati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fitri Rahmawati
NIM : 18208010008
Judul Tesis : **“Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2018”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Maret 2020

Pembimbing



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitri Rahmawati
NIM : 18208010008
Jurusan/Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “**Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2018**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote*, *footnote* atau daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Wassalamu'alikum warrahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 26 Maret 2020

Penyusun



Fitri Rahmawati
NIM: 18208010008

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Rahmawati
NIM : 18208010008
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2018”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada tanggal: 26 Maret 2020
Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



(Fitri Rahmawati)

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap”

(QS Al Insyirah : 6-8)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan dan penyusunan Tesis saya persembahkan kepada motivasi terbesar saya yaitu kedua orang tua saya (Bapak Saliman dan Ibu Yuniati) yang telah berjuang untuk kesuksesan putra putrinya. Dan juga untuk kakakku (Usman Arief) yang selalu memberikan arahan dan motivasi. Tak lupa sahabat, teman-teman dan orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta semua pihak yang telah mendukung saya dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذکر	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>Ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati تَنسَى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati فَرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syāms</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan lancar dan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam tak lupa penulis hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW nabi akhir zaman yang membimbing umatnya di jalan yang diridho'i Allah SWT dan semoga kita mendapatkan syafaat nabi Muhammad SAW di *yaummul qiyamah*, aamiin.

Penyusunan tesis merupakan rangkaian akhir dari Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun penulis tidak dapatungkiri bahwa dalam penyusunan penelitian tesis ini penulis masih banyak kekurangan, itu semata-mata karena keterbatasan penulis. Dalam penyusunan tesis ini penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan baik berupa moral, materiil maupun spiritual sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Phil. Sahiron, MA., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar mengarahkan dan membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
3. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., AK., CA., ACPA., selaku ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan, bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh Staf Tata dan Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluargaku tercinta, Bapak Saliman dan Ibu Yuniati, kakakku Usman Arief yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberi semangat, bantuan serta dukungan
9. Keluarga besar Magister Ekonomi Syariah 2018 terutama Magister Ekonomi Syariah A yang saling mendukung
10. Semua pihak yang telah berjasa, hingga terselesainya tesis ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.

Di samping itu penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik saran yang membangun dari pembaca akan sangat penulis hargai. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 26 Maret 2020

Hormat saya,



Fitri Rahmawati
18208010008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRCT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Landasan Teori	16
1. Kebijakan Fiskal	16
1.1 Kebijakan Fiskal Dalam Islam	19
2. Pengukuran Kinerja Pemerintah	24
2.1 Kinerja Dalam Islam	26
3. Efisiensi	28
3.1 Efisiensi Dalam Islam	30
4. Keuangan Daerah	33
4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36
4.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)	40
a. Dana Keistimewaan	42
4.3 Belanja Daerah	42
a. Belanja Langsung	45
5. Pembangunan Ekonomi	45
6. Kemiskinan	48
6.1 Kemiskinan Dalam Islam	50
B. Telaah Pustaka	53
C. Kerangka Berfikir	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Populasi dan Sampel	57
C. Sumber dan Jenis Data	57

D. Definisi Operasional Variabel	58
1. Variabel <i>Input</i>	58
2. Variabel <i>Output</i>	59
E. Teknik Analisis Data	59
1. Metode Pengukuran Efisiensi Dengan Metode <i>Stochastic Frontier Analysis</i> (SFA)	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Deskripsi Umum Penelitian	63
1. Kondisi Geografis D.I Yogyakarta	64
2. Kondisi Demografis D.I Yogyakarta	65
3. Kondisi Sosial D.I Yogyakarta	68
4. Kondisi Ekonomi D.I Yogyakarta	69
B. Deskripsi Data Penelitian	70
1. Variabel <i>Input</i>	70
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70
b. Dana Alokasi Khusus (DAK)	73
c. Belanja Langsung	75
2. Variabel <i>Output</i>	78
a. Kemiskinan	78
C. Hasil Analisis Data	79
1. Efisiensi Kinerja Fiskal	79
a. Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten Bantul	81
b. Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten Gunungkidul	85
c. Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten Kulonprogo	91
d. Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten Sleman	96
e. Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kota Yogyakarta	100
D. Pembahasan	105
1. Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal di D.I Yogyakarta	205
2. Prioritas Pembangunan Daerah di D.I Yogyakarta	128
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah di D.I Yogyakarta	131
4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah di D.I Yogyakarta	135
5. Pandangan Islam Terhadap Hasil Penelitian	142
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	146
C. Keterbatasan Penelitian	147
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	156

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kependudukan D.I Yogyakarta Tahun 2018	66
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk D.I Yogyakarta Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018	68
Tabel 4.3 Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta	80
Tabel 4.4 Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan	113
Tabel 4.5 Kinerja Capaian Fisik dan Keuangan Per Urusan Tahun 2013-2017..	117
Tabel 4.6 Interkoneksi Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pulau Jawa Tahun 2011-20183
Gambar 1.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) D.I Yogyakarta Tahun 2011-20184
Gambar 1.3 Presentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2011-20186
Gambar 1.4 Gini Ratio Pulau Jawa Tahun 2011-20187
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian56
Gambar 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk D.I Yogyakarta Tahun 2011-201866
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk D.I Yogyakarta Tahun 2018 Menurut Kelompok Umur67
Gambar 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di D.I Yogyakarta Tahun 201869
Gambar 4.4 Anggaran dan Realisasi PAD di D.I Yogyakarta Tahun 2011-201870
Gambar 4.5 Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah di D.I Yogyakarta Tahun 2011-201871
Gambar 4.6 Nilai Rata-Rata Komponen dari PAD di D.I Yogyakarta Tahun 2011-201872
Gambar 4.7 Anggaran dan Realisasi DAK di D.I Yogyakarta Tahun 2011-201874
Gambar 4.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung D.I Yogyakarta Tahun 2011-201875
Gambar 4.9 Komponen Belanja Langsung di D.I Yogyakarta Tahun 2011-201877
Gambar 4.10 Presentase Penduduk Miskin D.I Yogyakarta78
Gambar 4.11 Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten Bantul Tahun 2011-201881
Gambar 4.12 Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-201885
Gambar 4.13 Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-201892

Gambar 4.14 Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten Sleman	
Tahun 2011-2018	96
Gambar 4.15 Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kota Yogyakarta	
Tahun 2011-2018	101
Gambar 4.16 Rata-Rata Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal D.I Yogyakarta	
Tahun 2011-2018	106



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian	156
Lampiran 2. Hasil <i>Logaritma Natural</i>	157
Lampiran 3. Hasil Uji Efisiensi Menggunakan Alat Analisis <i>Stochastic Frontier Analysis (SFA)</i> dengan Bantuan <i>Software Frontier 4.1</i>	158
Lampiran 4. Tabel Penelitian Terdahulu	163



ABSTRAK

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, parameter keberhasilan dari kinerja fiskal merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jumlah penduduk miskin sebagai proksi dari indikator dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. Kinerja dari fiskal yang efisien akan memiliki dampak untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat sehingga dalam hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan dari jumlah penduduk miskin. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi kinerja fiskal Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta dengan menggunakan alat analisis *Stochastic Frontier Analysis* (SFA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi kinerja fiskal Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta pada tahun 2011-2018 tidak mencapai nilai efisiensi yang maksimal, tingkat efisiensi menunjukkan angka 60%, Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja fiskal di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tidak efisien.

Kata Kunci: Efisiensi Kinerja Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Langsung, *Stochastic Frontier Analysis* (SFA)



ABSTRACT

In measuring the level of public welfare, the parameter of success of fiscal performance is a very important thing to do. In this study, researchers used the number of poor people as a proxy of indicators in the level of community welfare. The performance of an efficient fiscal will have an impact to improve welfare in society so that in this case it will affect the decline of the number of poor people. This study has the objective to analyze the level of efficiency of the district / city fiscal performance in D.I Yogyakarta by using the Stochastic Frontier Analysis (SFA) analysis tool. The results showed that the average level of fiscal performance efficiency of regencies / cities in DI Yogyakarta in 2011-2018 did not reach the maximum efficiency value, the efficiency level showed a figure of 60%, so it can be said that the fiscal performance in the regencies / cities in DI Yogyakarta was not efficient.

Keywords: Fiscal Performance Efficiency, Local Revenue, Special Allocation Funds, Direct Expenditures, Stochastic Frontier Analysis (SFA)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah di suatu negara akan menetapkan sebuah keputusan maupun kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan. Untuk mewujudkan kestabilan ekonomi yang jauh lebih baik serta meningkatkan laju dari pembangunan ekonomi, maka dalam setiap pemerintahan akan ditetapkan sebuah rencana pembangunan yang terdapat dalam kebijakan fiskal yang disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu berupa penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah (Sudirman, 2011: 2).

Wilayah Indonesia yang besar dengan keanekaragaman mengakibatkan perbedaan kondisi kesejahteraan masyarakat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Mengenai kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi, sudah bukan zamannya lagi semuanya terpaku pada satu titik. Era ini telah mengubah model pembangunan ekonomi yang dulunya bersifat sentralisasi (*top down*) menjadi desentralisasi (*bottom-up*) atau yang dikenal dengan otonomi. Mengenai masalah pengendalian dalam bidang perekonomian, saat ini pembangunan telah bergeser ke daerah. Oleh sebab itu, diharapkan pembangunan daerah ke depannya dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat (Noor, 2015: 9).

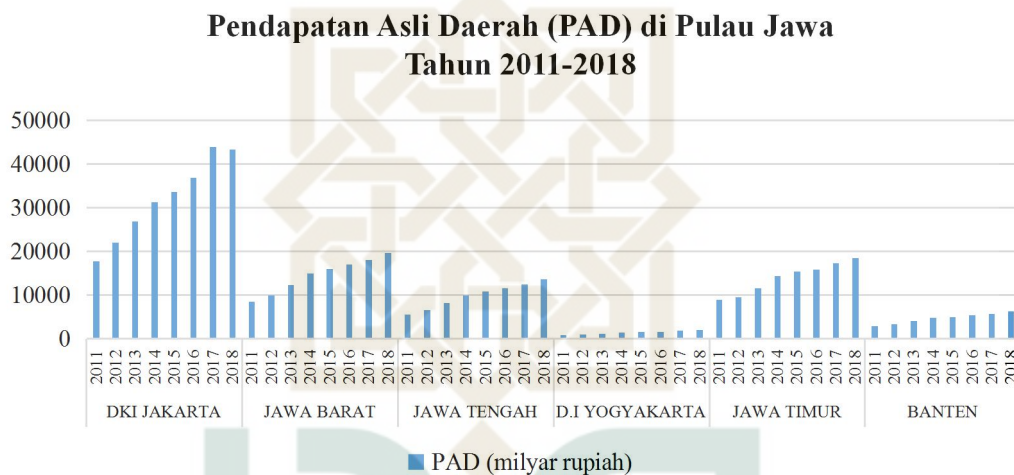
Penerapan otonomi daerah membuat pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan dengan kemampuan daerah dalam mengusahakan pendanaan dan

pembiayaan pembangunan di daerah masing-masing. PAD atau dapat juga disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan yang mampu mencerminkan tingkat kemampuan kemandirian daerah dalam pembangunan. Oleh sebab itu, keberadaan PAD menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat penting (Mardiasmo, 2002).

Badan Pusat Statistik (BPS) menilai bahwa perekonomian Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa jika dilihat dari kontribusinya. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan Pulau Jawa memberikan kontribusi sebesar 58,57%. BPS merilis, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2018 sebesar 5,17%. Di mana dilihat secara parsial pulau Jawa tumbuh 5,74% (Detik Finance, 5 November 2018). Menurut Saragih (2003), peningkatan Pendapatan Asli Daerah termasuk bagian dari cerminan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang arah pertumbuhan ekonominya positif, sehingga apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka terdapat kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Pertumbuhan PAD secara terus menerus akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Rori (2016), peningkatan PAD dapat ditunjukkan dengan adanya partisipasi dari masyarakat mengenai jalannya suatu pemerintahan di daerah. Apabila Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi maka akan menambah jumlah dana yang ada di pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya penambahan dana tersebut dapat digunakan untuk membangun serta meningkatkan kualitas dari fasilitas daerah seperti sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Salah satu tugas pemerintah daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

sehingga memerlukan Pendapatan Asli Daerah sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah yang merupakan tolak ukur bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Berikut merupakan data dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pulau Jawa Tahun 2011-2018.



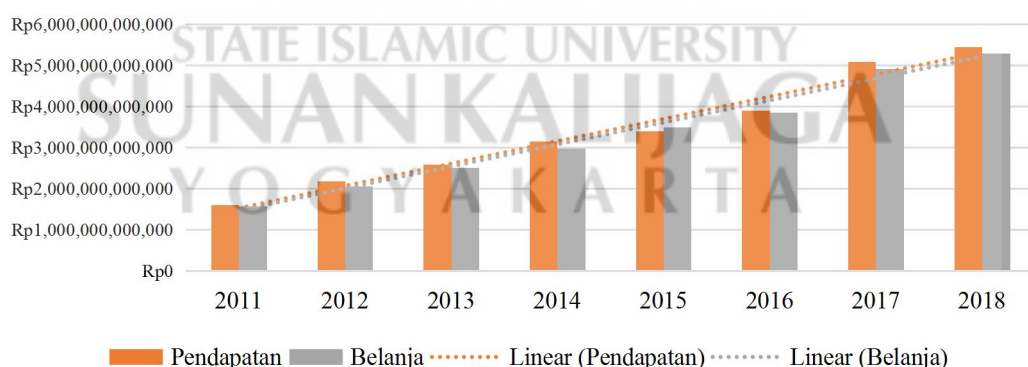
**Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pulau Jawa Tahun 2011-2018
(dalam miliar rupiah)**

(Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> 2019, data diolah)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di Pulau Jawa pada tahun 2011-2018 posisi terendah diduduki oleh D.I Yogyakarta, sedangkan posisi tertinggi diduduki oleh DKI Jakarta. Pada tahun 2011 realisasi PAD di D.I Yogyakarta sebesar Rp. 867,11 Miliar dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 sebesar Rp. 2.040,72 Miliar. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta dengan perolehan PAD tertinggi di Pulau Jawa, D.I Yogyakarta tertinggal jauh dengan selisih Rp. 41.286,41 Miliar atau setara dengan 41 Triliun Rupiah pada tahun 2018.

Suatu daerah dikatakan mandiri dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap penerimaan total APBD (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006: 40). Pada pembukaan Musrenbangda RPJPM D.I Yogyakarta 2017-2022, dari sisi APBD, postur pendapatan dan belanja daerah menunjukkan bahwa D.I Yogyakarta masih sangat bergantung dari dana transfer dari pusat. Dominasi transfer Dana Perimbangan mencapai 58%, sehingga diperlukan penguatan pembiayaan yang berasal dari potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD ini masih menggunakan instrumen generik seperti pajak dan retribusi. Ratio PAD terhadap Total Pendapatan juga menurun dari sekitar 30% di 2014 menjadi sekitar 28% di 2017. Hal ini mengindikasikan tingkat kemandirian fiskal daerah juga menurun (Kedaulatan Rakyat, 10 Februari 2018). Berikut merupakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) D.I Yogyakarta Tahun 2011-2018.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) D.I Yogyakarta Tahun 2011-2018



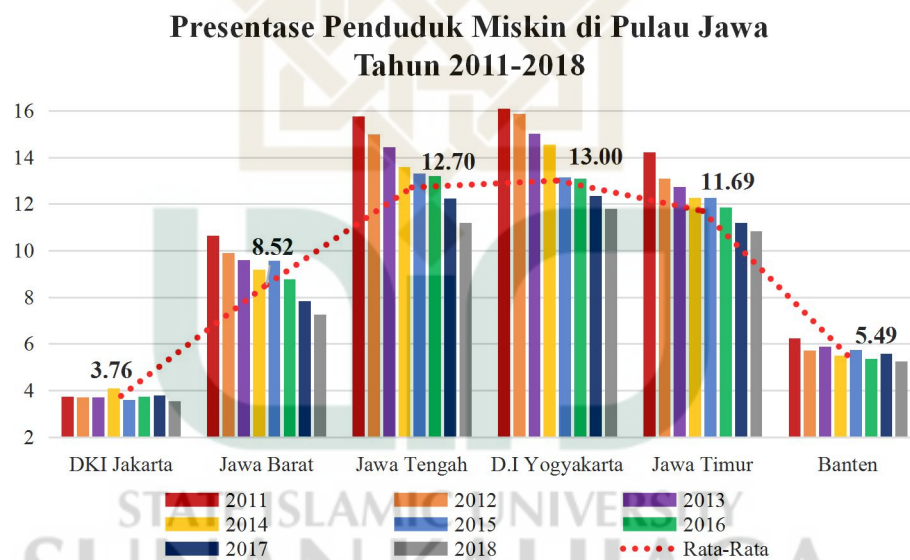
**Gambar 1.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
D.I Yogyakarta Tahun 2011-2018 (dalam ribu rupiah)**
(Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> 2019, data diolah)

Berdasarkan data di atas, bahwa realisasi APBD D.I Yogyakarta pada tahun 2011-2018 mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan trend di setiap tahunnya selama kurun waktu 8 tahun, baik itu dari di segi pendapatan maupun segi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2011-2018 apabila pendapatan daerah mengalami peningkatan maka total belanja daerah akan mengalami kenaikan pula. Dapat diasumsikan bahwa apabila pendapatan semakin besar maka alokasi biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan di suatu daerah juga akan semakin besar. Sehingga apabila alokasi yang digunakan untuk pembangunan semakin besar, maka hal ini akan berdampak pada pencapaian tujuan dari daerah yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang semakin besar.

Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan biaya keuangan daerah untuk kegiatan rutin dan pembangunan tidak disertai dengan kenaikan yang signifikan dengan besarnya dana daerah maka akan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat desentralisasi fiskal dapat berakibat pada rendahnya kemampuan daerah dalam pendanaan pembangunan. Untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan suatu pemerintah daerah, seluruh aktivitas pemerintah daerah harus dapat diukur dan dinilai. Dan pengukuran atau penilaian kinerja pemerintah daerah tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program organisasi tersebut tetapi lebih ditekankan kepada keluaran manfaat dari program tersebut (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006: 54).

Menurut Rahayu (2010), mengenai perencanaan pembangunan ekonomi, seharusnya rancangan dari kebijakan fiskal tidak hanya ditujukan untuk

mengembangkan aspek ekonomi saja seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, kemudian pengurangan pengangguran, serta stabilitasi ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan aspek sosial seperti pemerataan, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan (Jonaidi, 2012: 141). Selama tahun 2011-2018 jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta tercatat lebih tinggi dari Provinsi lain di Pulau Jawa. Berikut merupakan perbandingan presentase penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2011-2018.



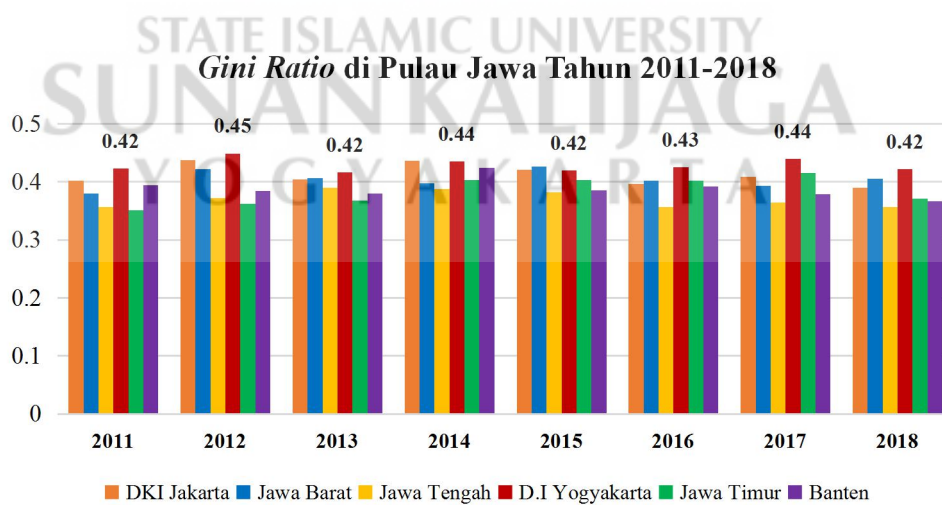
**Gambar 1.3 Presentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa
Tahun 2011-2018**

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2019, *data diolah*)

Berdasarkan pemaparan dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya presentase penduduk miskin yang berada di Pulau Jawa cenderung mengalami penurunan. Akan tetapi presentase penduduk miskin di D.I Yogyakarta menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan presentase penduduk miskin di Provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Tercatat presentase

penduduk miskin tertinggi di D.I Yogyakarta berada di angka 16,08% pada tahun 2011, D.I Yogyakarta selama tahun 2011-2018 memperoleh rata-rata presentase penduduk miskin sebesar 13,00% lebih tinggi dari hasil yang diperoleh oleh Provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa. Selama tahun 2011-2018 terjadi penurunan sebesar 4,27%, di tahun 2018 presentase penduduk miskin di D.I Yogyakarta sebesar 11,81%.

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, selain dapat dilihat dari segi presentasi jumlah penduduk miskin, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat melalui ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang diukur melalui rasio gini atau koefisien gini (*gini ratio*). Rasio gini atau koefisien gini (*Gini Ratio*) ini menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0-1, indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan sama sekali. Berikut merupakan rasio gini atau koefisien gini (*gini ratio*) Pulau Jawa pada tahun 2011-2018.



Gambar 1.4 Gini Ratio di Pulau Jawa Tahun 2011-2018
(Sumber: Badan Pusat Statistik 2020, *data diolah*)

Berdasarkan pemaparan grafik di atas, dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan di D.I Yogyakarta mengalami fluktuatif. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, angka ketimpangan di D.I Yogyakarta masih tergolong tinggi dengan rata-rata selama kurun waktu 2011-2018 sebesar 0,43. Perolehan angka tertinggi di D.I Yogyakarta berada pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,45. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan yang ada di D.I Yogyakarta.

Dalam suatu tatanan kebijakan pada umumnya, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu prestasi dari tingkat pertumbuhan yang tinggi serta pemerataan. Apabila hanya memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi saja dapat memungkinkan hanya akan menguntungkan sebagian kecil dari masyarakat dan akan meninggalkan sebagian besar masyarakat miskin. Sedangkan apabila hanya mengutamakan pemerataan saja tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka tidak akan meningkatkan kesejahteraan atau dengan kata lain hanya berputar pada pemerataan kemiskinan. Oleh sebab itu suatu kebijakan ekonomi di suatu negara harus disusun untuk lebih *pro-growth* (memacu pertumbuhan ekonomi), *pro-job* (memperluas lapangan pekerjaan), dan *pro-poor* (mengurangi kemiskinan) (Maipita, 2014: 78).

Tingginya ketergantungan fiskal berdampak pada *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih dinikmati kelompok penduduk kaya, sementara penduduk miskin hanya menikmati sebagian kecil dari manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lisna (2013),

permasalahan tingginya ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada dana transfer fiskal dari pemerintah pusat terutama DAU sebagai konsekuensi pelimpahan kewenangan pemerintahan melalui kebijakan desentralisasi fiskal tidak memberi dampak positif dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budi (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja fiskal berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, hal ini menunjukkan bahwa ketika ada suatu yang mempengaruhi kinerja fiskal akan berdampak pada kemiskinan.

Pemerintah memberikan suatu kewenangan di tingkat daerah seperti penciptaan lapangan pekerjaan, mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor primer dan sekunder diantaranya untuk menentukan arah kebijakan dari pembangunan daerah yang dapat berpengaruh terhadap target-target pembangunan nasional. Di sisi lain, dengan adanya pemberian kewenangan di tingkat daerah yang memiliki potensi untuk mengelola sumber daya yang lebih efisien dapat menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, pengukuran kinerja di suatu daerah sangat penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengevaluasi serta menjadi sebuah informasi yang akurat dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan selanjutnya (Sudirman, 2011: 33).

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Keistimewaan bertujuan untuk menjaga warisan budaya, melestarikan serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat D.I Yogyakarta. Bidang kebudayaan merupakan bidang dengan anggaran terbesar, untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta, maka Dana Keistimewaan yang dianggarkan seharusnya dialokasikan ke belanja modal dengan presentase lebih besar dibanding dengan belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Peningkatan belanja modal dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan penurunan jumlah penduduk miskin (Pronosokodewo, 2018).

Akan tetapi dewasa ini, DPR menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di D.I Yogyakarta dan terjadinya ketimpangan sosial serta pembangunan di D.I Yogyakarta. Padahal, keberadaan Dana Keistimewaan diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat, sehingga perlu dikaji ulang mengenai pengalokasian Dana Keistimewaan. Tercatat pada tahun 2019 Dana Keistimewaan sebesar 2,1 Triliun akan tetapi keberadaan dana tersebut belum mampu untuk menyejahterakan masyarakat. Menurut DPR RI, perlu dilihat kembali regulasi dari pusat terkait dengan Dana Keistimewaan, apakah dana tersebut diperuntukan untuk pengisian jabatan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, atau tata ruang. Jika ini menjadi persoalan tentu akan menghambat program pengentasan kemiskinan. Menurut Sekretaris Daerah D.I Yogyakarta, ada batasan dan ketentuan penggunaan Dana Keistimewaan. Meski sudah masuk dalam APBD dalam bentuk DAK namun penggunaan juga sudah terprogram sesuai perencanaan. Untuk saat ini, Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta merintis pola pendistribusian Dana Keistimewaan hingga ke Kabupaten/Kota dalam bentuk BKK (Bantuan Keuangan Khusus) agar Dana Keistimewaan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat (Harian Jogja, 8 Juli 2019).

Dalam dokumen RPJPD disampaikan bahwa pada masa mendatang pembangunan ekonomi diharapkan untuk dapat meningkat dengan struktur perekonomian yang kuat dengan ditandai adanya penguatan dari peranan sektor sekunder dan tersier yang semakin menguat serta didukung dengan adanya sektor primer yang dapat diandalkan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pemerataan dan juga kesejahteraan masyarakat secara luas yang dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan (RPJPD D.I Yogyakarta, 2005-2025: 68).

Dalam Pasal 258 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan suatu pembangunan untuk meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dalam perencanaan pembangunan, keuangan daerah merupakan bagian yang krusial, sehingga perlu menganalisis terkait dengan kondisi dan juga proyeksi dari keuangan daerah agar kemampuan daerah tersebut dalam mendanai suatu rencana pembangunan dapat diketahui. Selain itu juga, perlu secara efektif untuk memberikan perhatian terkait topik dan juga mengenai permasalahan secara tepat. Dengan demikian, menganalisis keuangan daerah yang akurat dapat mewujudkan sebuah kebijakan yang efisien dalam pengelolaan keuangan daerah (RKPD D.I Yogyakarta, 2019: 517).

Di sisi lain, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil masih terdapat permasalahan dalam bidang pembangunan yaitu angka kemiskinan di D.I Yogyakarta yang masih tinggi. Jika melihat kontribusi PAD terhadap penerimaan total APBD menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah menurun,

dikarenakan masih mengandalkan transfer dari pusat. Sementara data realisasi anggaran APBD menunjukkan tren kenaikan, hal ini diasumsikan apabila alokasi untuk pembangunan memiliki nilai yang besar dan terus mengalami peningkatan, maka pencapaian tujuan daerah terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin besar pula. Berdasarkan latar belakang di atas, penting untuk mengetahui efisiensi kinerja fiskal dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Untuk itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2018”**.

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terkait dengan kinerja fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian dana fiskal yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Langsung. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan seberapa efisien pengelolaan keuangan daerah jika dilihat dari segi permasalahan pembangunan yang ada, yaitu melalui perhitungan efisiensi kinerja fiskal yang dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat yang diprosikan dengan jumlah penduduk miskin. Apakah hasil analisis tersebut sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui kebijakan yang sudah ada, maupun dengan program yang telah dijalankan. Selain itu juga berkontribusi untuk melihat apakah hasil dari penelitian ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang ada di daerah D.I Yogyakarta berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) D.I Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efisiensi kinerja fiskal di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan mengenai efisiensi kinerja fiskal di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Keberadaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan diantaranya adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk menyusun suatu kebijakan
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan kinerja fiskal

D. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan yang akan dibahas di penelitian ini terbagi menjadi lima bab utama. Pembagian bab utama tersebut selanjutnya akan ditulis secara berurutan dengan runtutan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang dilakukan, yaitu melalui penggambaran sebuah isu atau fenomena yang sedang terjadi terkait dengan kinerja fiskal di D.I Yogyakarta, selanjutnya akan dilanjutkan mengenai penulisan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan disajikan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai teori yang digunakan oleh penulis untuk mendukung rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya dalam penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang dilakukan, yaitu berisi mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, definisi operasional variabel dan teknik analisis yang digunakan

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai deskripsi dari objek penelitian, penjabaran dari hasil analisis data yang dilakukan serta pembahasan secara mendalam mengenai hasil dan temuan beserta implikasinya.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis menuliskan kesimpulan, saran serta keterbatasan penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan.



Sudirman, I Wayan. 2011. *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*, Jakarta: Kencana

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Mkaro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sriwinarti, Asih. 2011. Analisis Kemiskinan Regional Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Otonomi Daerah Tahun 2002-2010, *Buletin Ekonomi*, Vol. 9, No. 1

Sriyana, Jaka. September 2011. Kinerja Fiskal Daerah: Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, Vol. 15 No. 2

Todaro, Michael P. 1995. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang: Sebuah Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip Masalah dan Kebijakan Pembangunan*. Bumi Aksara

Todaro, Michael P. 2011. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

Tribun Jogja, 26 Desember 2014. Diakses pada 14 Februari 2020 Pukul 22:00 WIB (<https://jogja.tribunnews.com/2014/12/26/perkembangan-pad-pariwisata-sleman-lamban>)

Tribun Jogja. 3 Januari 2017. Diakses pada 02 Februari 2020, Pukul 19:54 WIB (<https://jogja.tribunnews.com/2017/01/03/pad-gunungkidul-dari-pbb-tembus-rp-168-miliar?page=2>)

Tribun Jogja. 7 Januari 2017. Diakses pada 01 Februari 2020, Pukul 23:45 WIB (<https://jogja.tribunnews.com/2017/01/03/pad-pariwisata-di-bantul-lampau-target>)

Tribun Jogja, 26 November 2017. Diakses pada 18 Februari 2020 Pukul 22:31 WIB (<https://jogja.tribunnews.com/2017/11/26/pad-kota-yogyakarta-dinilai-rendah>)

Tribun Jogja. 9 Januari 2018. Diakses pada 17 Februari 2020, Pukul 20:52 WIB (<https://jogja.tribunnews.com/2018/01/09/sector-pendidikan-mendapat-alokasi-anggaran-tertinggi-apbd-kabupaten-sleman>)

Tribun Jogja, 22 September 2018. Diakses pada 18 Februari 2020 Pukul 23:07 WIB (<https://jogja.tribunnews.com/2018/09/22/dpupkp-kota-yogyakarta-maksimalkan-perencanaan-fisik-tahun-2019>)

Tribun Jogja. 8 November 2019. Diakses pada 3 Februari 2020, Pukul 12:14 WIB (<https://jogja.tribunnews.com/2019/11/08/dapodik-tidak-update-renovasi-sd-gedangklutuk-tersendat?page=2>)

Wang, Zihan. 2019. Is The Photovoltaic Poverty Alleviation Project The Best Way For The Poor to Escape Poverty? A DEA and GRA Analysis of Different Projects in Rural China, *Energy Policy, Elsevier*